



## KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

#### I. TUPOKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat daerah kota padang, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan sistem pelayanan kependudukan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hal ini berakibat pada penyerapan tenaga kerja lokal dan penerapan teknologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada dinamika perekonomian daerah.

Berkaitan dengan tuntutan kemandirian dari pelaksanaan ekonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan visi sebagai cara pandang jauh kedepan kemana organisasi hendak dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan memiliki gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk tahun 2014 – 2019, yaitu :

***“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK Secara Tertib Tahun 2018”***

Adapun Visi tersebut merupakan gambaran yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 5 (lima) tahun ke depan dan untuk menjalankan Visi dimaksud maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang Akurat Tertib dan Aman”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana terdapat perubahan yang sangat mendasar tentang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu dengan adanya perubahan/revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 azas yang dianut tidak lagi ***stelsel pasif*** tapi adalah ***stetsel aktif***, maksudnya sebagai instansi pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus aktif untuk meminta masyarakat



agar memiliki dan mengurus dokumen kependudukannya.

## II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

### a. Belanja Tidak Langsung

No.	Kegiatan	Realisasi		Keterangan
		Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5
1.	Gaji dan Tunjangan Rp. 3.408.668.682,-	100	97,27	-
2.	Tambahan Penghasilan PNS Rp. 1.075.680.000,-	100	95,58	-

### b. Belanja Langsung

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.750.000,-	Jumlah materai 6000/3000 yang dibeli dan jumlah surat/paket yang dikirim	Tersedianya SPJ Administrasi Perkantoran dan terkirimnya surat/paket	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 511.200.000.-	Pembayaran rekening telpon, listrik dan internet/jaringan/faksimil	Lancarnya jaringan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas	100	92,86
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 10.000.000,-	Jumlah pajak kendaraan roda empat 4 unit dan roda dua `4 unit yang dibayar	Lancarnya operasional kendaraan dinas	100	75,66
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 35.240.000,-	Jumlah komputer/laptop/printer/ge nset yang diperbaiki	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	91,72
5	Penyediaan alat tulis kantor Rp. 43.320.000,-	Jumlah alat tulis kantor(ATK ) yang dibeli	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,70
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 65.072.440,-	Jumlah barang cetakan yang di cetak	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	97,38



7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp. 5.000.000,-	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	99,70
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 162.000.000,-	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	92,81
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 2.500.000,-	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Tersedianya peralatan rumah tangga	100	99,80
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan Rp. 11.115.000,-	Jumlah media untuk mendapatkan informasi	Terpenuhinya informasi melalui media masa	100	99,69
11	Penyediaan makanan dan minuman Rp. 23.826.000,-	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu	100	99,50
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 205.000.000,-	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	100	98,42
13	Penyediaan Alat Kebersihan Rp. 5.000.000,-	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	Pelayanan yang prima (cepat dan tepat)	100	100
14	Penyediaan jasa pelayanan publik Rp. 20.765.520,-	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100	86,68
15	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rp. 48.896.560,-	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi kantor dan pelayanan dokumen kependudukan	Terbantunya pelaksana tugas perkantoran	100	83,03

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Mebeleur Rp. 74.750.000,-	Jumlah mobileur yang diadakan	Tersedianya mobileur	100	97,28
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 278.673.000,-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	88,64
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 18.750.000,-	Jumlah peralatan kantor yang dapat diperlihara	Berfungsinya peralatan AC dan genset dengan baik	100	97,84



4	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Rp. 10.500.000,-	Jumlah mobiler yang meja dan kursi	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	100
---	--	------------------------------------	-----------------------------	-----	-----

### 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 25.000.000,-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	Meningkatnya akuntabilitas /pertanggung jawaban keuangan kantor	100	99,46

### 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi	
				Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
1	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Rp. 143.780.000,-	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan berbasis SIAK	Tersedianya database yang akurat untuk semua kegiatan	100	95,80
2	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Interfase tahap awal) NIK Rp. 71.620.000,-	Pelaksanaan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK	Terpenuhinya akses data pada instansi yang telah dilakukan perjanjian kerja samanya	100	86,94
4	Pelayanan Akta Catatan Sipil Rp. 394.557.000,-	Pelayanan akta-akta catatan sipil	Pelayanan dibidang pencatatan sipil	100	99,80
5	Pemeliharaan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip akta catatan sipil Rp. 108.111.000,-	Terpeliharanya arsip dan dokumen kependudukan	Meningkatnya sistem pengolahan kearsipan dokumen kependudukan	100	-
7	Sosialisasi peraturan perundang-undangan kependudukan Rp. 184.750.000,-	Sosialisasi peraturan perundang-undang dibidang kependudukan	Bertambahnya pemahaman masyarakat arti pentingnya dokumen kependudukan	100	97,73
9	Perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis SIAK Rp. 314.278.000,-	Perekaman dan percetakan dokumen kependudukan KTP-el	Terlaksananya perekaman dan tercetaknya KTP-el	100	98,09



10	Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) Rp. 256.915.000,-	Pelayanan unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling	Pelayanan unit pendaftaran penduduk dan penatatan sipil keliling (UP3SK)	100	94,12
13	Pemuthakiran data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital Rp. 125.000.000,-	Terwujudnya backup data akta catatan sipil dalam bentuk arsip digital	Tersimpannya dokume akta dalam bentuk bacup secara digital	100	98,03
	Pemukhtahiran data kematian, perkawinan, perceraian melalui program SIAK Rp. 150.000.000,-	Jumlah pendataan data kematian, perkawinan, perceraian dan kelahiran	Tersedianya data kematian, perkawinan, perceraian dan kelahiran	100	95,32
	Pelayanan dan Pendaftaran Mutasi Penduduk Rp. 389.562.500,-	Jumlah dokumen pendaftaran dan mutasi penduduk yang dilayani	Pelayanan pendaftaran dan mutasi penduduk	100	99,77
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik) Rp. 1.588.069.000,-	Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP- el	100	97,96

**c. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah		Persentase (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Pendapatan Denda Retribusi)</b>			
1	Kartu Keluarga (KK)	12.500.000	19.165.000	153,32
2	Denda Akta Kelahiran	625.750.000	1.005.800.000	160,74
4	Denda Akta Perkawinan	3.750.000	7.875.000	210,00
6	Denda Akta Kematian	1.125.000	2.355.000	209,33
8	Denda Akta Perceraian	375.000	300.000	80,00
9	Denda Pengangkatan Anak (Adopsi)	500.000	700.000	140,00
10	Denda Pengesahan Anak	4.500.000	7.575.000	168,33
11	Denda Perubahan Nama	2.250.000	3.975.000	176,67
	<b>Jumlah</b>	<b>650.750.000</b>	<b>1.047.745.000</b>	<b>162,29</b>



### III. PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIPOROLEH TAHUN 2017

- Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2017 oleh BPK RI, Memuaskan.
- Pada Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan targetnya sebesar Rp. 650.750.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 1.047.745.000,- (162,29 %) dengan rincian sebagai berikut :

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum (Akta Catatan Sipil) dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 650.750.000,- **dan realisasi mencapai Rp. 1.047.745.000,- (162,29 %)** dengan rincian :

- Kartu Keluarga target Rp. 12.500.000,- realisasinya mencapai Rp. 19.165.000 (153,32%)
- Denda Akta Kelahiran target Rp. 625.750.000,- realisasinya mencapai Rp.1.005.800.000,- (160,74%)
- Denda Akta Perkawinan target Rp. 3.750.000,- realisasinya mencapai Rp.7.875.000,- (210,00%)
- Denda Akta Kematian target Rp. 1.125.000,- realisasinya mencapai Rp.2.355.000,- (209,33%)
- Denda Akta Perceraian target Rp. 375.000,- realisasinya mencapai Rp. 300.000,- (80,00%)
- Denda Adopsi target Rp. 500.000,- realisasinya mencapai Rp. 700.000,- (140,00%)
- Denda Pengesahan Anak target Rp. 4.500.000,- realisasinya mencapai Rp.7.575.000,- (168,33%)
- Denda Perubahan Anak target Rp. 2.250.000,- realisasinya mencapai Rp.3.975.000,- (176,67%)

Pencapaian Penerimaan Asli Daerah (PAD) tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan baik dan kedepannya tetap bertekad akan selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



#### **IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

##### **PERMASALAHAN :**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan Tugas dan Fungsi dengan memanfaatkan sebagian dari gedung ex. SMA 1 dulu, dengan memanfaatkan ruangan yang sangat terbatas sehingga kurang representatif ditambah dengan area parkir yang tidak memadai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama sarana keterbatasan ruangan pelayanan dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan.
3. Pembebasan tanah untuk kantor disdukcapil belum terealisasi
4. Pembangunan kantor Disdukcapil belum terealisasi

##### **SOLUSI :**

1. Menata lingkungan kantor yang ada dengan menambah loket, agar pelayanan dapat terbagi dengan simpul yang sesuai dengan jenis pelayanan, maka untuk selanjutnya mohon dukungan bersama agar gedung yang baru dapat dibangun pada Tahun Anggaran 2019, sehingga memberikan kenyamanan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada melalui pemanfaatan ruang teras kantor menjadi loket-loket untuk pelayanan dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap prasarana agar dapat dimanfaatkan.
3. Terkait dengan pembebasan tanah dan pembangunan kantor disduk capil yang belum terealisasi, maka disdukcapil sudah mengusulkan pembebasan tanah dan pembangunan gedung tahun anggaran 2019 dengan langkah awal memasukkannya ke dalam RENJA 2019.

Padang, Januari 2018  
Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil

**Drs. WEDISTAR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630303 198210 1 003

